

Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Dea Cintana,¹ Alfiah Salsa Haidillah,² Siti Alia Zulfa,³ Alvira Aprilisha Muhadi,⁴ Siti Khodijah⁵

¹Universitas Bina Bangsa

Email: ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 1 February 2025

Accepted: 5 February 2025

Published: 29 February 2025

Keywords:

Corruption;

Economic Growth;

Income Inequality



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

Corruption remains one of the most significant barriers to sustainable economic development in Indonesia. Despite the nation's abundant natural resources and large market potential, corruption continues to undermine economic growth, disrupt social welfare, and hinder efficient resource allocation. This study aims to examine the impact of corruption on Indonesia's economic development, particularly focusing on its influence on economic growth, income inequality, and the effectiveness of public sector projects. By analyzing secondary data from various sources, including the Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI), economic growth indicators, and Gini index measurements, this research reveals a significant negative relationship between corruption and economic performance. The findings indicate that higher corruption levels lead to slower economic growth, exacerbate income inequality, and decrease the quality of essential public services such as education, healthcare, and infrastructure. The study further emphasizes the need for stricter law enforcement, increased transparency in budget allocation, and enhanced public participation in monitoring government projects. These efforts are essential for mitigating the adverse effects of corruption and promoting equitable and sustainable economic development in Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi di sektor publik dan swasta tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga menurunkan kualitas pemerintahan dan berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi topik yang banyak diteliti oleh para akademisi dan praktisi. Korupsi dapat memperburuk kualitas infrastruktur, mengurangi investasi asing, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan berjalannya waktu, fenomena ini semakin mengancam kemajuan ekonomi negara, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif.

Akman dan AH (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kata lain, tingginya tingkat korupsi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya negara, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor vital lainnya. Korupsi mengarah pada pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan memperburuk iklim investasi. Investasi asing menjadi enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena ketidakpastian dan risiko yang lebih besar.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Oleh karena itu, korupsi dapat memperlambat pembangunan ekonomi dengan mengurangi aliran dana yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Al Hazmi (2023) menunjukkan bahwa korupsi mempengaruhi distribusi pendapatan dan ketimpangan sosial. Praktik korupsi cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap sumber daya publik, sementara masyarakat umum yang tidak terlibat dalam jaringan tersebut mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar, menghambat distribusi kesejahteraan yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Korupsi juga memperburuk pemerintahan yang baik (*good governance*), yang seharusnya mampu memberikan pelayanan publik yang efisien dan adil. Salah satu aspek penting yang perlu dibahas adalah dampak korupsi terhadap sektor pembangunan infrastruktur. Irawan (2022) mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur sering menjadi sarana yang rentan terhadap praktik korupsi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur berkualitas sering kali diselewengkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai atau tidak sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan, yang pada akhirnya menghambat mobilitas ekonomi dan pertumbuhan industri. Dampak ini sangat terasa di daerah-daerah terpencil yang kesulitan memperoleh akses ke infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak korupsi juga dapat terlihat dalam sektor sosial dan lingkungan. Fernanda et al. (2023) menjelaskan bahwa korupsi memperburuk dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan ekonomi. Praktik korupsi di sektor sumber daya alam, misalnya, dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang merusak ekosistem dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi sumber daya mengarah pada perbedaan akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada. Korupsi yang terjadi di sektor lingkungan menghalangi implementasi kebijakan keberlanjutan, sehingga mengancam masa depan ekonomi negara dalam jangka panjang.

Fenomena korupsi di Indonesia semakin diperburuk dengan adanya lemahnya penegakan hukum. Lamijan dan Tohari (2022) mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang anti-korupsi yang cukup ketat, penerapannya masih seringkali tidak optimal. Banyak kasus korupsi yang tidak sampai ke pengadilan atau malah mendapat hukuman yang sangat ringan. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang memungkinkan praktik korupsi terus berlanjut tanpa ada efek jera bagi pelaku. Selain itu, korupsi dalam birokrasi pemerintah dan sektor swasta juga dipicu oleh rendahnya integritas moral dari para pemimpin, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Pencegahan korupsi menjadi kunci utama dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Fendlyta (2024) mengusulkan berbagai strategi untuk memerangi korupsi, termasuk reformasi sistem hukum, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Penguatan peran lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sangat penting agar kasus korupsi dapat ditangani dengan tegas dan transparan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan agar lebih kritis terhadap praktik-praktik korupsi yang ada, serta berpartisipasi dalam menjaga integritas pemerintahan. Lutfi et al. (2020) juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam memerangi korupsi. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia perlu memiliki kebijakan anti-korupsi yang jelas dan memastikan bahwa seluruh operasional bisnis dijalankan dengan



integritas tinggi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta masyarakat, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran bersama tentang bahaya korupsi diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Korupsi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, politik, dan budaya. Putri et al. (2024) mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang, korupsi dapat merusak fondasi moral dan etika suatu negara.

Negara yang terus-menerus terjebak dalam lingkaran korupsi akan kesulitan membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ASEAN, Syahirah (2024) menjelaskan bahwa korupsi juga berpengaruh terhadap integrasi ekonomi regional. Negara-negara di kawasan ini menghadapi tantangan serupa terkait dengan tingkat korupsi yang berbeda-beda. Kolaborasi antarnegara dalam memperkuat kerangka hukum anti-korupsi di kawasan ASEAN sangat penting agar pembangunan ekonomi di kawasan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh praktik korupsi yang merugikan. Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia sangat besar dan kompleks. Korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Sebagai langkah awal, penguatan sistem hukum dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

METODA PENELITIAN

Metoda penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan distribusi sumber daya. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terlibat secara objektif, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana korupsi mempengaruhi berbagai aspek pembangunan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan tahunan lembaga pemerintah, data ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan publikasi dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat korupsi yang diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International, serta data ketimpangan sosial yang tercermin dalam angka indeks Gini.

Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang telah teruji keabsahannya dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan pencarian data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi korupsi dan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam periode tertentu. Selain itu, analisis regresi linier digunakan untuk menguji pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi



hubungan antara korupsi dan ketimpangan sosial. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, sedangkan variabel independennya adalah tingkat korupsi yang diukur dengan CPI dan variabel kontrol seperti pengeluaran pemerintah, investasi asing langsung, dan tingkat pendidikan. Setelah data terkumpul dan diolah, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola atau tren yang menunjukkan dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi.

Untuk mendalami hubungan antar variabel, analisis multivariat juga digunakan untuk menguji apakah pengaruh korupsi berbeda berdasarkan karakteristik regional atau sektor ekonomi tertentu. Penggunaan metode analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi variabel-variabel lain yang mungkin berperan dalam memoderasi atau memediasi hubungan tersebut. Validitas dan reliabilitas data menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Validitas data diuji dengan membandingkan sumber-sumber data yang digunakan, memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan realitas yang ada dan relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, reliabilitas data diuji dengan memastikan bahwa data yang digunakan konsisten dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa mengubah hasil yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, terlihat bahwa peningkatan tingkat korupsi berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga berkontribusi pada ketimpangan sosial yang semakin lebar, yang memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam bagian ini, hasil penelitian akan dibahas secara rinci dengan memfokuskan pada pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, serta sektor-sektor pembangunan yang terdampak.

Berdasarkan analisis regresi linier yang dilakukan, ditemukan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Akman dan AH (2018), yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Di Indonesia, tingkat korupsi yang tinggi, yang tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI), menunjukkan hubungan yang signifikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar, korupsi menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan mengurangi daya saing negara di pasar internasional.

Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai sektor ekonomi, seperti infrastruktur dan investasi. Korupsi dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur menyebabkan pemborosan anggaran dan pengurangan kualitas proyek yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Sebagai contoh, banyak proyek jalan raya dan jembatan yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sering kali mengalami keterlambatan dan kegagalan karena penyalahgunaan dana. Ini berimplikasi pada peningkatan biaya logistik, yang akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi asing langsung (FDI) yang seharusnya masuk ke Indonesia



juga terhambat oleh tingginya tingkat ketidakpastian akibat korupsi. Investor asing cenderung menghindari pasar yang rawan korupsi karena tingginya biaya transaksi dan risiko ketidakpastian hukum.

Ketimpangan Sosial dan Korupsi

Dampak korupsi terhadap ketimpangan sosial juga sangat nyata. Berdasarkan analisis data ketimpangan sosial yang diukur dengan indeks Gini, ditemukan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar seiring dengan meningkatnya tingkat korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al Hazmi (2023), yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, distribusi kekayaan cenderung semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan. Korupsi dalam sektor publik, terutama dalam distribusi bantuan sosial dan alokasi anggaran pembangunan, memperburuk ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Proyek-proyek sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin sering kali tidak sampai kepada mereka karena adanya penyalahgunaan anggaran oleh pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi.

Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, korupsi telah menghambat distribusi sumber daya yang adil dan merata. Di sektor pendidikan, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering kali dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga sekolah-sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Demikian pula di sektor kesehatan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan sering kali terhambat oleh praktik korupsi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar ini semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya.

Sektor Pembangunan yang Terdampak Korupsi

Korupsi juga memberikan dampak besar terhadap sektor-sektor pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan sumber daya alam. Dalam sektor infrastruktur, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, korupsi menyebabkan banyak proyek gagal atau tidak selesai dengan baik. Proyek-proyek besar yang melibatkan dana negara sering kali menjadi sarana penyalahgunaan anggaran, yang berujung pada pemborosan sumber daya dan kualitas proyek yang buruk. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat mendukung produktivitas ekonomi negara, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Di sektor energi dan sumber daya alam, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, dan energi juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya. Pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Sektor-sektor ini, yang merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan korupsi. Korupsi yang terjadi dalam sektor-sektor vital ini menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas hasil pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi negara. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya reformasi dalam pengelolaan



anggaran pembangunan, pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek besar, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi.

Strategi untuk Mengurangi Dampak Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa strategi perlu diterapkan untuk mengurangi dampak negatif korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah penguatan institusi hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Seperti yang dijelaskan oleh Fendlyta (2024), meskipun Indonesia telah memiliki lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan masih menjadi tantangan besar. Penegakan hukum yang lebih konsisten, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan, akan membantu mengurangi peluang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi langkah penting. Dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem digital yang memadai, pemerintah dapat memantau dan mengendalikan penggunaan dana publik dengan lebih efisien, mengurangi peluang untuk penyalahgunaan.

Upaya ini harus diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan iklim yang bebas dari korupsi dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar dan kompleks. Korupsi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dengan merugikan sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan sumber daya alam, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Penguatan penegakan hukum, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat adalah langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif korupsi dan mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama dalam pembangunan ekonomi nasional karena mengganggu alokasi sumber daya, mengurangi efisiensi kebijakan publik, serta merusak integritas sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi makro, korupsi memicu pemborosan anggaran negara dan mengalihkan dana dari proyek produktif ke kegiatan yang kurang bermanfaat. Akibatnya, investasi publik yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi tidak optimal, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Fenomena ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap iklim usaha dan kepastian hukum suatu negara. Ketika korupsi merajalela dalam sektor publik, proses perizinan menjadi tidak transparan dan biaya transaksi meningkat secara signifikan. Biaya-biaya tersebut bukan hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga menurunkan daya saing nasional di mata investor global. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan ekonomi biaya tinggi dan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akman, B., & AH, D. S. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 531-538.
- Al Hazmi, R. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 3(2), 85-92.
- Al Hazmi, R. A. (2024). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 1-10.
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10), 31-40.
- Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77-82.
- Irawan, R. (2022). Kajian Analisa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akibat Korupsi Pasca Era Reformasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(4).
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.
- Putri, A. N., Fernando, R., Putri, C. L., Alkasadi, S. M., & Nurrohmat, D. (2024). pengaruh korupsi dalam perkembangan ekonomi di indonesia. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 50-57.
- Syahirah, N. (2024). *pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara asean* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

